



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia  
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT TIM  
PELAKSANA EITI**

- Hari/Tanggal : Kamis, 5 Januari 2017  
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana  
Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
- Agenda : 1. Presentasi *Independent Administrator* (IA) untuk *Inception Report*  
Laporan EITI 2014  
2. Penyampaian Laporan ke Tim Pelaksana EITI terkait roadmap Beneficial  
Ownership dan Permohonan Penambahan Batas Waktu Laporan EITI  
2014 yang telah dikirimkan ke Sekretariat Internasional EITI.  
3. Pembahasan Rencana Kerja Tahun 2017  
4. Pembahasan *Scoping Study* dan Rencana Penyelesaian Laporan EITI  
2015  
5. Pembahasan Rencana Pilot *Commodity Trading*
- Peserta Rapat  
Pemerintah : 1. Kementerian Perekonomian, Deputi III: Bastian H, Syaiful Mujab,  
Nurwahid, Rosiana K, Agus H  
2. Setjen ESDM : Frieski Putra, Alpen  
3. Ditjen Minerba ESDM: Sri Raharjo  
3. Ditjen Pajak, Kemenkeu : Ahmad Zaky Zamani, Chenris C  
4. Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu: Adijanto, Sigit  
Harjanto  
5. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu: Edward Horas, Mulyono  
6. Ditjen Anggaran: Kemenkeu: Evi Karmilah, Seprina Hasan,  
Mariatul Aini,  
7. BPKP: Risnandar, Budi Winahyu  
8. Ditjen Bina Keuda, Kemendagri: Sofyan, Febrian Arhan  
9. SKK Migas: Selvi, Runi Nareswari, Sondang Maria
- Pemerintah Daerah : Sekda Kaltim: Rusmadi, Bantolo, Reza H  
Sekda Jatim: Kukuh Sudjatmiko
- Asosiasi Industri dan  
Perusahaan : APBI-ICMA: Supriatna Suhala  
IMA : Syahrir AB, Adam  
Pertamina: Ari Marsudi, Heri Purwanto
- Masyarakat Sipil : PWYP dan koalisi: Yesi, Meliana, Asri Nuraeni, Rizky Ananda
- Bank Dunia : Noriko T
- Sekretariat EITI : Edi Effendi, Ronald Tambunan, Agus Trianto, Doni Erlangga, Andrian, Anggi  
Gartika

Ernst and Young (EY) : Bangkit K, Izhari, Liliana, Dwi Wijayanti, Dinar, Ika M, Inez, Antania, David

## A. PEMBUKAAN

Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Koordinator Nasional EITI, Bpk Bastian Halim membuka rapat dan kemudian mempersilahkan Ketua Tim Sekretariat EITI, Bpk Edi Tedjakusuma untuk menyampaikan agenda rapat.

Bpk Edi: EY telah mulai bekerja sebagai Independent Administrator (IA) dan telah bekerja sejak 5 Desember 2016. Saat ini Inception Report telah selesai dan diharapkan mendapatkan masukan. Agenda lainnya dalam rapat yaitu penyampaian rencana kerja 2017 dengan melihat hasil kinerja tahun 2016. Agenda selanjutnya yang terkait dengan pelaporan yaitu persiapan pengerjaan Laporan EITI 2015 yang akan didahului dengan Scoping study. Proses pengerjaan laporan 2015 akan bersamaan dengan penyelesaian Laporan EITI 2014. Agenda lainnya yaitu pembahasan tindak lanjut rekomendasi 2012-2013 yang hasilnya akan ditagih untuk laporan 2014 dan untuk validasi di tahun 2018.

Beberapa agenda lainnya yaitu penyampaian ke Tim Pelaksana tentang beberapa isu yaitu surat ke menteri keuangan untuk pembukaan pajak masih ditindaklanjuti, penyampaian iuran EITI Indonesia ke EITI Internasional yang masih menunggu keputusan Menko Perekonomian, Keanggotaan EITI Daerah berdasarkan keputusan Menko, apakah ditambah atau dikurangi, Sekretariat EITI telah mengirimkan roadmap BO dan permintaan extension ke EITI Internasional, dan Kebijakan keterbukaan data (open data policy) yang telah ditagih penyelesaiannya oleh EITI Internasional.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Presentasi *Independent Administrator (IA)* untuk Inception Report laporan EITI 2014

Bpk Bangkit Kuncoro membuka presentasi dan memohon bantuan anggota MSG untuk membantu pengumpulan data terutama sektor Minerba.

Bpk Izhari menyampaikan kesulitan di awal pengerjaan laporan karena adanya standar baru yaitu standar 2016 sehingga harus kembali melihat scoping note lagi dan membandingkan dengan laporan sebelumnya. Beberapa perubahan di standar baru di beberapa hal seperti Beneficial Ownership (BO), validasi, mainstream reporting.

Rencana rekomendasi yang akan ada di laporan yaitu scoping note yang lebih detil, perlu ada perubahan template yang lebih baik, dan penyertaan laporan EITI sebagai bagian resmi keuangan negara.

Rekomendasi untuk scoping Note untuk pelaporan EITI 2014 yaitu: perlu mencantumkan informasi kontribusi industri ekstraktif untuk pembangunan ekonomi lokal, perlu mencantumkan informasi perusahaan migas dan minerba yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi yang signifikan, dan mencantumkan data pemilik aset dari perusahaan pemegang ijin kerja. **Selengkapnya dapat dilihat di materi presentasi EY tentang Inception Report.**

Untuk laporan kontekstual menjelaskan tentang kondisi industri ekstraktif saat ini terutama isu-isu tentang migas dan minerba di luar scoping note. Isu utama sektor migas di luar scoping note yaitu Revisi UU No 22 Tahun 2001, investasi migas rendah, wacana gross profit, holding BUMN migas, dan pembubaran petral. Sedangkan isu di sektor minerba yaitu izin pertambangan, peningkatan nilai tambah, tambang liar, sustainability, impact CSR, dan badan pengelola pertambangan. **Keterangan Selengkapnya dapat dilihat di materi presentasi EY tentang Inception Report.**

Ibu Lily (EY) menyampaikan penjelasan tentang laporan rekonsiliasi dari 5 Desember 2016 hingga 5 Januari 2017. Entitas pelapor untuk Laporan EITI 2014 yaitu 72 perusahaan migas, 121 perusahaan minerba, dan 7 instansi pemerintah. Untuk sektor migas dari 173 operator dan partner, yang sudah melapor 109 atau 63 %. Untuk sektor minerba dari 119 perusahaan, baru 39 yang melapor atau 33 %. Hal ini karena perusahaan pemegang IUP masih belum banyak yang melapor. Untuk instansi pemerintah,

dari 7 instansi yang telah memberikan laporan 5 instansi atau 71 %. Yang menjadi kesulitan adalah pengumpulan data dari sektor minerba terutama pemegang IUP dan pengumpulan data pajak karena faktor birokrasi.

Tanggapan:

Ibu Selvi (SKK Migas): Untuk pengumpulan data dari Medco SCN seharusnya masih bisa diminta karena tahun 2014 perusahaan masih ada dan tahun 2015 menjadi 2 perusahaan. Untuk Medco Mahakam, mereka dapat dikategorikan sebagai operator sekaligus mitra. *Participating interest* harusnya ada di template sehingga harus diingatkan kalau belum diisi. Data di SKK Migas, kontraktor dan Ditjen Migas kerap ada perbedaan. Data SKK dengan kontraktor biasanya sama. Tapi antara SKK Migas dan Ditjen Migas kerap berbeda karena adjustment dengan data tahun sebelumnya. Sedangkan penghitungan secara tri wulanan yang juga dilakukan oleh kontraktor membuat data sama. Untuk perolehan data tahun 2017 ini sedikit lebih sulit karena adanya beberapa kasus PHK.

Bpk Adijanto (Ditjen Perbendaharaan): Data dari pemerintah baru 70%, karena kesulitan data maka kita memakai data di LKPP. Ditjen Perbendaharaan siap melakukan konfirmasi ke perusahaan tambang asal mereka memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Kalau tak ada NTPN akan sulit karena susah dilacak.

Bpk Zaki (DJ Pajak): Apabila perusahaan tak mampu menunjukkan NTPN sedangkan data berbeda, data milik Negara lebih benar/kuat. Untuk laporan EITI 2014, clearance belum disampaikan. Apabila seperti tahun lalu, apabila sudah 30% clearance segera disampaikan ke pajak. Tahun ini apakah akan dicicil atau disampaikan semuanya di belakang. Hal ini bisa dilakukan sambil menunggu proses permintaan pembukaan data pajak dari Kemenko ke Kementerian Keuangan.

Bpk Sri Raharjo (DJ Minerba): Tentang keterlambatan penerimaan minerba. Sejak tahun 2015, Ditjen Minerba ada direktorat PNBP nanti akan disampaikan. Untuk IUP yang kurang kooperatif bisa disampaikan, akan dicoba dibantu walaupun Ditjen Minerba sendiri juga kesulitan mengetahui alamat yang benar dari pemegang IUP.

Ibu Evi (Ditjen Anggaran): Mempertanyakan kenapa KKKS tak menyampaikan data lifting. Untuk data migas, sebagian ada di rekening antara di direktorat PNBP dan SKK Migas, sebelum di kas Negara. Hal ini berbeda dengan sektor minerba yang langsung ke kas umum negara. Sektor migas sebagian langsung ke kas negara, sebagian ke rekening sementara. Jadi masih harus ada rekonsiliasi antara SKK Migas dan Ditjen Anggaran.

## **2. Rencana Kerja Tahun 2017**

### ***Rencana Kerja selengkapnya di materi Presentasi***

Tanggapan:

Ibu Selvi mempertanyakan hubungan antara BO dengan laporan 2014. Dijawab Bpk Edi bahwa BO belum wajib di laporan 2014.

Bpk Rusmadi (Sekda Kaltim): Data di daerah sebenarnya sudah tersedia karena merupakan data tahun 2014. Untuk daerah, data digunakan untuk memastikan apakah dana transfer sudah benar. Bagi daerah data digunakan untuk mengantisipasi situasi yang akan terjadi. Karena sebagian besar dari migas dan batubara yang beberapa tahun terakhir pertumbuhannya turun. Informasi BO juga berguna karena dampaknya lingkungannya juga besar.

Untuk rencana pelaksanaan EITI Daerah, Kaltim menyambut baik karena saat ini pelaksanaan UU 23/2014 tentang peralihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi masih mengalami kendala.

Kukuh Sudjarmiko (Setda Jatim): Bagaimana status keanggotaan sebagai Tim Pelaksana karena 3 tahun ada pergantian? Apabila ada, harus ada SK. Bpk Sofyan (Kemendagri) akan menindaklanjuti. Bpk Ronald (Sekretariat EITI) menambahkan bahwa usulan pergantian telah diusulkan tahun 2015 lalu, namun belum ditindaklanjuti. Nanti akan dibuatkan pengajuan kembali termasuk CSO dan asosiasi. Namun CSO telah merefresh perwakilan di MSG pada tahun 2015 lalu.

### **3. Rencana Pilot *Commodity Trading***

Pembiayaan oleh kedutaan Swiss dan dikelola langsung oleh Sekretariat Internasional EITI.

Sejumlah kegiatan akan dilakukan untuk menyelesaikan laporan terkait *Commodity Trading* mulai dari persetujuan TOR, pengadaan konsultan, kegiatan-kegiatan FGD dan workshop, hingga persetujuan MSG terkait penyelesaian laporan *Commodity Trading*. **Selengkapnya di materi *Presentasi*.**

### **4. Tindak Lanjut Laporan EITI 2012-2013**

#### ***Rekomendasi dan tindak lanjut selengkapnya di presentasi***

Tanggapan:

Tindak lanjut rekomendasi dari DJ Migas masih harus dikonfirmasi lagi.

Tindak lanjut rekomendasi tentang pembukaan isi kontrak telah ditanggapi oleh SKK Migas. Pembukaan terhalang dengan UU No 14 2008. Ibu Selvi mengatakan bahwa hal tersebut telah dikomunikasikan dengan legal SKK Migas. Pembukaan hanya bisa dilakukan lewat DPR. Bpk Ari Marsudi (Pertamina) menambahkan bahwa pembukaan hanya lewat DPR, masyarakat umum belum bisa mendapat akses informasi. Bpk Rusmadi (Sekda Kaltim) mempertanyakan komitmen SKK Migas karena tidak bisanya pembukaan data kontrak. Ibu Selvi mengatakan bahwa SKK hanya pelaksana kontrak, permohonan pembukaan seharusnya ke kementerian ESDM. Bpk Edi memohon agar Bpk Bastian bisa membawa masalah ini ke rapat yang lebih tinggi terutama yang menyangkut pemerintah daerah.

Bpk Sri raharjo menanggapi rekomendasi akses publik pada informasi kadaster agar dibuka yaitu Minerba One Map Indonesia (MOMI) sebentar lagi diluncurkan. Masyarakat umum bisa mengakses data kadaster walaupun terbatas. Rekomendasi tentang akses pada salinan IUP untuk yang CnC dimungkinkan. Publik dapat mengakses softcopy salinan IUP. Tindak lanjut rekomendasi tentang sulit dan lambatnya memperoleh data informasi dari perusahaan khususnya IUP, Bpk Sri raharjo optimistis dengan adanya UU 23 2014 karena adanya pengalihan kewenangan ke provinsi. Kasus sulitnya mendapatkan informasi IUP saat kewenangan di Kabupaten. saat di kabupaten. Pelaksanaan UU 23 2014 akan didukung peraturan pelaksana dari Dagri.

Bpk Adijanto menanggapi tindak lanjut rekomendasi kesalahan pencatatan akun pada sektor minerba menyebabkan adanya perbedaan pencatatan antara Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Mulai tanggal 31 Desember 2016 penerimaan Negara MPN G1 yang sebagian sistemnya masih manual telah selesai. Mulai 1 Januari MPN G2 yang sistemnya online telah berlaku.

### **5. Lain-lain**

Bpk Edi menyampaikan bahwa upaya pembukaan data pajak tanpa persetujuan perusahaan telah ditindak lanjuti. Surat dari Menko Perekonomian ke Menteri Keuangan untuk pembukaan data pajak telah diproses.

EITI Internasional mengharapkan tiap negara memberikan iuran 10.000 dolar AS pertahun untuk validasi. Hal ini masih menunggu arahan dari Bpk Menko.

Upaya pembentukan EITI Daerah akan segera dilaksanakan dengan meminta masukan Dagri

Penyelesaian laporan Open data policy berdasarkan EITI Standar 7.1 dan 7.2 seharusnya selesai akhir tahun 2016. Sekretariat EITI akan membuat draft awal yang akan dikonsultasikan ke MSG. PWYP memberikan masukan agar meminta masukan ke Open government dan Transparansi Internasional yang telah melakukan sebelumnya, agar EITI tak mulai dari awal. Bpk Sri Raharjo menyarankan untuk EITI agar berkoordinasi dengan KIP.

## **C. PENUTUP**

Bpk Bastian menutup rapat dengan menyampaikan perlu tidaknya Perpres 26/2010 perlu direvisi atau tidak karena penting untuk pelaksanaan EITI daerah. Perlu juga koordinasi kegiatan EITI dengan kegiatan kegiatan K/L lain agar sinkron dan tak overlap.

#### **D. HASIL KESEPAKATAN RAPAT**

1. Tim Pelaksana EITI menyetujui Inception Report dari EY.
2. Tim Pelaksana menyetujui rencana kerja 2017 termasuk pelaksanaan EITI Daerah yang didukung oleh perwakilan Tim Pelaksana EITI dari daerah.
3. Rekomendasi Laporan EITI 2012-2013 akan ditindaklanjuti lagi.
4. Rencana Pilot Commodity Trading akan mulai dilaksanakan dengan menghubungi stakeholder terkait.